BAB III

TELAAH HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PUTUSAN

(No.59/Pdt.Sus-PKPU/2014/PN.Niaga.Jkt.Pst)

A. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Dalam Putusan (No.59/Pdt.Sus-PKPU/2014/PN.Niaga.Jkt. Pst) Menurut Undang-undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, pengertian pailit dapat dilihat dalam Pasal 1 angka (1) yang menyebutkan Kepailitan adalah

Untuk dapat menjelaskan bagaimana implementasi Undang-undang Republik Indonesia Nomor.37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dalam Putusan (No.59/Pdt.Sus-PKPU/2014/PN.Niaga.Jkt) maka dalam hal ini penulis akan menjelaskan apa itu Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU). Kepailitan adalah sita umum atas semua harta kekayaan debitor pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator dibawah pengawasan hakim pengawas. Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (*surceance van betaling* atau *suspension of payment*) adalah suatu jangka waktu yang diberikan Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 kepada debitor dan kreditor berdasarkan putusan hakim Pengadilan Niaga, untuk musyawarah guna mencapai perdamaian dalam bentuk mengenai cara dan waktu pembayaran utang debitor kepada kreditor dalam jumlah seluruhnya atau sebagian dari utang.

Antara Kepailitan dan PKPU yang lebih menguntungkan bagi kreditor maupun debitor adalah dengan mengajukan permohonan PKPU ke Pengadilan Niaga. Kerena dalam kasus penundaan pembayaran memiliki implikasi pada ranah debitor yang berada dalam keadaan sulit untuk memenuhi (membayar) utangnya secara penuh, misalnya perusahaan debitor pada saat itu menderita kerugian, kebakaran yang menimpa pabrik, *resensi* ekonomi, dan peristiwa *overmacht*. Kesulitan debitor tersebut belum menjadi indikasi kearah kepailitan. Apabila debitor diberikan waktu mengevaluasi kinerja usahanya, debitor dapat memohon penundaan pembayaran dengan tujuan agar bisa memperbaiki ekonomi dan membayar utangnya kepada kreditor.

Dengan mengajukan permohonan PKPU, kreditor telah memberikan waktu (*timing*) kepada debitor untuk merestrukturisasi utangnya bahkan mungkin merorganisasi perusahaannya, maka besar pula kemungkinan debitor dapat melanjutkan usahanya kembali. Manfaat bagi kreditor memberikan wilayah evaluasi untuk debitor yang diberikan PKPU agar berkesempatan memperbaiki kinerja atau mengatasi kesulitan ekonomi keuangannya, maka kreditor kemungkinan besar akan memperoleh pembayaran piutang secara penuh, sehingga tidak merugikan para kreditor. Dari manfaat PKPU tersebut sudah banyak perkara yang menempuh dengan jalan mengajukan permohonan ke pengadilan niaga guna menyelesaikan masalah agar tidak merugikan kedua belah pihak salah satunya adalah perkara No.59/Pdt.Sus-PKPU/2014/PN.Niaga.Jkt.

Proses PKPU dalam Putusan No. 59/Pdt.Sus-PKPU/2014/PN.Niaga. Jkt.Pst. ke Pengadilan Niaga Jakarta pada tanggal 23 Oktober 2014 ini melibatkan

PT. Netwave Multi Media (selanjutnya disebut sebagai pemohon) dan PT. Bakrie Telkom Tbk. (selanjutnya disebut sebagai termohon). Permohonan PKPU diajukan oleh pemohon yang diketahui merupakan salah satu kreditor dari termohon. Hubungan hukum yang mengikat pemohon dengan termohon yaitu adanya perjanjian sewa-menyewa induk kerjasama penyediaan dan penggunaan infrastruktur telekomunikasi untuk penempatan perangkat telekomunikasi (selanjutnya disebut perjanjian sewa infrastruktur telekomunikasi (*infrastructure-provider*). Sedangkan termohon PKPU dalam perkara tersebut merupakan pihak penyewa infrastruktur telekomunikasi. Berdasarkan perjanjian sewa infrastruktur komunikasi tersebut, timbul kewajiban pembayaran oleh termohon selaku penyewa infrastruktur telekomunikasi kepada pemohon.

Termohon berkawajiban melakukan pembayaran kepada pemohon berupa harga sewa untuk setiap lokasi infrastruktur telekomunikasi (selanjutnya disebut *site*). Pembayaran sewa *site* oleh termohon awalnya berjalan lancar, namun dikemudian hari termohon tidak lagi memenuhi kewajiban sehingga mendapatkan teguran baik secara tertulis maupun lisan dan mengadakan pertemuan dengan termohon untuk membahas mengenai kewajiban termohon. Pertemuan tersebut menghasilkan kesepakatan bahwa pemohon memberikan diskon harga sewa sebesar 7,5% atas utang yang diakibatkan oleh perjanjian sewa infrastruktur komunikasi tersebut. Namun, dalam pelaksanaannya termohon tidak pernah memenuhi kewajibannya untuk membayar utang secara berkala sebagaimana yang telah disepakati. Termohon hanya melakukan pembayaran utangnya pada tanggal

11 September 2014 sebesar Rp.58.320.000 dari total utang keseluruhan yang berjumlah Rp.755.244.000.

Berdasarkan keadaan tersebut, pemohon menilai bahwa tidak adanya itikad baik¹ dan kesungguhan dari pihak termohon dalam memenuhi kewajibannya yaitu dengan sengaja tidak melunasi pembayaran. Pemohon memperkirakan bahwa termohon tidak dapat membayar utang-utangnya yang sudah jatuh waktu sebagaimana yang disepakati. Untuk itu, pemohon memilih upaya PKPU sebagai cara agar dapat memperoleh hak-hak atas utang sewa *site* oleh termohon dikarenakan lebih menguntungkan daripada melalui proses kepailitan. Selanjutnya, pemohon mengajukan Permohonan PKPU ke Pengadilan Niaga Jakarta pada tanggal 23 Oktober 2014.

Untuk mengabulkan permohonan yang diajukan oleh pemohon Hakim harus memeriksa bukti yang diajukan oleh pemohon agar memenuhi syarat dikabulkannya permohonan. Menurut Gustav Radbrunch hukum harus mengandung 3 (tiga) nilai identitas yaitu : (1) Aspek kepastian hukum (*rechtmatigheid*) asas ini meninjau dari segi yuridis; (2) Aspek keadilan hukum (*gerechtigheid*) asas yang ditinjau dari segi filosofis; (3) Aspek kemanfaatan hukum (*zwechmatigheid*) asas ini ditinjau dari segi sosiologis². Hakim akan menggunakan ketiga dasar hukum tersebut untuk mengabulkan dan memutuskan perkara. Maka dari itu untuk menjelaskan implementasi Undang-Undang Kepailitan dan PKPU dalam putusan (No.59/Pdt.Sus-PKPU/2014/PN.Niaga.Jkt)

¹ Itikad Baik adalah niat, maksud, atau kemauan yang baik dan jujur tanpa maksud untuk menipu atau merugikan orang lain dan menguntungkan diri sendiri

² M.Hadi Shubhan, *Hukum Kepailitan Prinsip, Norma, dan Praktik di Pengadilan*, Hlm.189

penulis akan menganalisis putusan yang berhubungan dengan 3 (tiga) dasar hukum tersebut.

Aspek kepastian hukum (*rechtmatigheid*) adalah kepastian undang-undang atau peraturan, segala macam cara, metode lain sebagainya harus berdasarkan undang-undang atau peraturan. Didalam kepastian hukum terdapat hukum positif dan hukum tertulis. Hukum tertulis oleh lembaga yang berwenang, mempunyai sanksi yang tegas, sah dengan sendirinya ditandai dengan diumumkannya di Lembaga negara. Dalam hal ini hakim menggunakan asas kepastian hukum untuk mengabulkan permohonan yang diajukan oleh pemohon dengan mempertimbangkan alasan dan syarat yang diajukan pemohon.

Alasan pemohon mengajukan PKPU adalah pemohon dan termohon memiliki hubungan hukum yang mengikat yaitu adanya perjanjian sewa-menyewa induk kerjasama penyediaan dan penggunaan infrastruktur telekomunikasi untuk penempatan perangkat telekomunikasi (selanjutnya disebut perjanjian sewa infrastruktur telekomunikasi (*infrastructure-provider*) dimana pemohon adalah pihak penyedia infrastruktur (kreditor) dan termohon adalah pihak penyewa infrastruktur (debitor); dengan perjanjian tersebut termohon berkewajiban membayar sewa kepada pemohon berupa harga sewa untuk setiap lokasi infrastruktur telekomunikasi tersebut (selanjutnya disebut *site*), yang besarnya didasarkan atas Berita Acara Sewa (BAS). Berdasarkan BAS untuk masing-masing *site* maka kerjasama sewa *site* antara termohon dan pemohon adalah sebagai berikut :

TABEL 3.1
BERITA ACARA SEWA (BAS)

No	Berita Acara	Nama <i>Site</i>	Masa sewa (10 tahun)		Harga sewa/bulan (Rp)
			Awal sewa	akhir sewa	
1	001/EST-BA/NMM/XII/2009	Cisoka	30/12/2009	30/12/2019	14.500.000,-
2	001/EST-BA/NMM/1/2010	Kasirin	02/02/2010	02/02/2019	14.500.000,-
3	003/EST-BA/NMM/V/2010	Kutabumi	10/05/2010	10/05/2019	12.500.000,-
4	004/EST-BA/NMM/XII/2010	HOS Cokroaminoto	27/12/2010	7/12/2019	12.500.000,-
Total biaya sewa per bulan (exclude PPN + PPh)					54.000.000-

Sumber data : putusan No.59/Pdt.Sus-PKPU/2014/PN.Niaga.Jkt 2019

Pada awalnya pembayaran sewa tersebut lancar, tetapi sejak masa sewa Desember 2012, termohon PKPU tidak memenuhi kewajibannya walaupun pemohon telah beberapa kali memberikan teguran baik lisan maupun tertulis. Pada tanggal 24 Februari 2014 termohon mengajukan permohonan diskon atas harga sewa terhutang sebesar 15% dan mengajukan pengakhiran kerjasama tersebut sejak 1 Maret 2014 sebagaimana surat No.3019/EST-03/operation/II/2014 tanggal 25 Februari 2014. Pemohon menanggapi pemohon diskon dan pengakhiran perjanjian sewa tersebut yang intinya pemohon PKPU hanya bersedia memberikan diskon hargasewa sebesar 7,5% sebagaimana tertuang dalam surat Nomor 002/Dir/NMM/02/2014 tanggal 27 Februari 2014.

Tanggal 2 Mei 2014 Termohon melalui suratnya Nomor.6609/EST-05/Finance/V/2014 telah mengakui adanya kewajiban pembayaran dengan cara mengangsur yaitu : bulan Mei 2014 akan dibayarkan sebesar Rp.174.960.000; bulan Juni 2014 akan dibayarkan sebesar Rp.233.280.000; bulan Juli 2014 akan dibayarkan sebesar Rp.233.280.000; bulan agustus akan dibayarkan sebesar Rp.233.280.000.

Pada tanggal 13 september 2014, pemohon mengirimkan surat kepada termohon yang menyetujui pengakhiran perjanjian sewa infrastruktur dengan ketentuan selain kewajiban pembayaran utang sewa, termohon wajib membayar biaya sewa sampai akhir sisa sewa untuk seluruh site, yaitu sebesar Rp.3.982.000.000,- sehingga kewajiban termohon membayar utang terhadap pemohon sebesar Rp. 4.737.244.000,-. Pada tanggal 19 september 2014, termohon melalui surat Nomor 14757/EST-06/Legal/IX/2014 menyetujui total utang yang diajukan oleh pemohon. Termohon sampai diajukannya permohonan ini tidak melakukan pembayaran atas total utang yang diakui dan sudah jatuh waktu dan dapat ditagih.

Pemohon melalui kuasa hukumnya mengirimkan surat teguran Nomor 250/BNJ/X/14, pada tanggal 1 oktober 2014 kepada termohon yang isinya memberitahukan adanya peristiwa cidera janji yang telah dilakukan oleh termohon, pemohon meminta dan/atau menagih termohon secara patut untuk membayar kewajiban utang-utangnya. Dengan adanya utang termohon, maka terbukti secara sah adanya hubungan hukum antara pemohon dan termohon, dibuktikan juga pemohon merupakan kreditor dari termohon³, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 1 UU Kepailitan⁴ yang berbunyi : *“kreditor adalah orang yang mempunyai piutang karena perjanjian atau undang-undang yang dapat ditagih dimuka pengadilan”*.

³ Putusan No.59/Pdt.Sus-PKPU/2014/PN.Niaga.Jkt, Hlm.5

⁴ Undang-Undang No.37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

Pemohon sebagai kreditor yang sah berhak mengajukan permohonan PKPU *a quo*⁵ terhadap termohon maka sudah selayaknya agar Majelis Hakim Pemeriksa Perkara menerima Permohonan PKPU *a quo*. Permohonan *a quo* telah memenuhi syarat-syarat pegajuan PKPU yang diatur dalam ketentuan Pasal 222 ayat (1) dan ayat (3) UU Kepailitan : Pasal 222 ayat (1) UU Kepailitan⁶ mengatur : *“Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang diajukan oleh Debitor yang mempunyai lebih dari (satu) 1 Kreditor ayau oleh Kreditor”*. Selanjutnya Pasal 222 ayat (3) UU Kepailitan mengatur bahwa : *Kreditor yang memperkirakan bahwa Debitor tidak dapat melanjutkan membayar utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih, dapat memohon agar kepada Debitor diberi penundaan kewajiban pembayaran utang, untuk memungkinkan Debitor mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada Kreditornya”*.

Pemohon juga telah memenuhi syarat formil dan materil. Guna membuktikan dalil permohonan, pemohon telah mengajukan bukti surat diberi tanda P1 sampai dengan P7 sehingga telah memenuhi syarat formal. Dengan syarat telah diajukan oleh pemohon maka Majelis Hakim menyatakan bahwa permohonan PKPU yang diajukan pemohon telah memenuhi syarat formil yang ditentukan oleh undang-undang. Untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya dan menguatkan jawabannya T-1a sampai dengan T-1d dan T2, Pemohon memenuhi syarat materil yakni :

⁵ *A quo* artinya tersebut. Permohonan *a quo* adalah perkara tersebut/ perkara yang sedang diperselisihkan.

⁶ Undang-Undang No.37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

- a. Termohon PKPU adalah debitor dari pemohon PKPU

Termohon adalah debitor dari pemohon dibuktikan bahwa merupakan dari fakta hukum sebagaimana dinyatakan dalam ketentuan Pasal 1 angka 3 UU⁷ Kepailitan yang berbunyi : *“Debitor adalah orang yang mempunyai utang karena perjanjian atau Undang-Undang yang pelunasannya dapat ditagih dimuka pengadilan”*. Selain itu termohon memiliki utang sewa sebesar Rp.755.244.000,- , dan utang sisa masa sewa sebesar Rp.3982.000,- kepada pemohon⁸.

- b. Adanya utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih secara sederhana

Kewajiban membayar utang yang harus dibayar oleh termohon dengan jumlah total sebesar Rp.4.737.244.000,- yang terdiri utang Sewa terhitung masa sewa dari bulan Januari 2013 sampai dengan Februari 2014 dengan pembayaran yang telah dipotong 7,5% sesuai kesepakatan dengan total pembayaran Rp.755.244.000,-⁹ dengan perincian sebagai berikut :

TABEL 3.2
PERINCIAN UTANG TERMOHON

No	Masa Sewa	No.Invoice	Jumlah Setelah dikurangi PPH	Diskon 7.5%	Jumlah Pembayaran setelah diskon
1	Jan-13	006/NMM/01/2013	58,320,000	(4,374,00)	53,946,000
2	Feb-13	003/NMM/02/2013	58,320,000	(4,374,00)	53,946,000
3	Mar-13	001/NMM/03/2013	58,320,000	(4,374,00)	53,946,000

⁷ Undang-Undang No.37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

⁸ Putusan No.59/Pdt.Sus-PKPU/2014/PN.Niaga.Jkt, Hlm.6

⁹ Putusan No.59/Pdt.Sus-PKPU/2014/PN.Niaga.Jkt, Hlm.7

4	Apr-13	001/NMM/ 04/2013	58,320,000	(4,374,00)	53,946,000
5	May-13	001/NMM/ 05/2013	58,320,000	(4,374,00)	53,946,000
6	Jun-13	001/NMM/ 06/2013	58,320,000	(4,374,00)	53,946,000
7	Jul-13	001/NMM/ 07/2013	58,320,000	(4,374,00)	53,946,000
8	Aug-13	001/NMM/ 08/2013	58,320,000	(4,374,00)	53,946,000
9	Sep-13	001/NMM/ 09/2013	58,320,000	(4,374,00)	53,946,000
10	Oct-13	001/NMM/ 09/2013	58,320,000	(4,374,00)	53,946,000
11	Nov-13	001/NMM/ 11/2013	58,320,000	(4,374,00)	53,946,000
12	Dec-13	001/NMM/ 12/2013	58,320,000	(4,374,00)	53,946,000
13	Jan-13	001/NMM/ 01/2013	58,320,000	(4,374,00)	53,946,000
14	Feb-13	002/NMM/ 02/2013	58,320,000	(4,374,00)	53,946,000
			816,480,000	61,236,000	755,244,00

Sumber : putusan No.59/Pdt.Sus-PKPU/2014/PN.Niaga.Jkt 2019

Dan utang sisa masa sewa sebesar Rp.3.982.000.000,- dengan data tersebut termohon telah memiliki utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih dengan jumlah akumulasi menjadi sebesar Rp.4.737.244.000,-

Pemohon juga telah meminta dan atau/ menagih terhadap termohon dengan secara patut untuk membayar utang-utangnya dengan mengajukan teguran (somasi) melalui : Surat Pemohon PKPU kepada termohon PKPU Nomor 004/Dir/NMM/04/2014 tertanggal 15 April 2014, Surat Permohonanan PKPU Nomor 004/DIR/NMM/IX/2014, tanggal 13 September 2014, dan surat Teguran Pemohon PKPU melalui kuasa hukumnya Nomor 250/BNJ/X/14,tanggal 1 Oktober 2014. Hingga tanggal

diajukan permohonan PKPU termohon tidak membayar dan/atau melunasi utangnya, dengan demikian menjadi salah satu bukti adanya utang debitor yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih sebagaimana terdapat dalam ketentuan Pasal 222 ayat (3) UU Kepailitan dan untuk dapat diajukannya permohonan PKPU oleh Pemohon selaku kreditor yang sah dari termohon telah terpenuhi.

- c. Termohon PKPU memiliki lebih dari satu (1) kreditor yang dapat dibuktikan secara sederhana dengan laporan keuangan termohon

Pemohon dapat membuktikan adanya kreditor lain berdasarkan Laporan Keuangan Konsolidasian termohon beserta Laporan auditor independen untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013 dan 2012 yang diaudit oleh kantor Akuntan Publik Tjiendra dan Handoko Tomo (Laporan Keuangan Termohon Audited) yaitu :

- 1) PT. Multi Kontrol Nusantara dengan jumlah utang per 31 Desember 2014 sebesar Rp.4.537.068.261,-
- 2) PT. Viva Media Baru dengan jumlah utang per 31 Desember 2014 sebesar Rp.2.693.517.386,-
- 3) Credit Suisse dengan jumlah utang per 31 Desember 2013 sebesar Rp.498.452.189.778,-
- 4) PT. Bank Central Asia Tbk dengan jumlah utang per 31 Desember 2013 sebesar Rp.540.416.603,-
- 5) PT Mandiri Tunas Finance dengan jumlah utang per 31 Desember 2013 sebesar Rp. 375.650.000,-

Dengan fakta-fakta tersebut dan bukti Laporan Keuangan termohon maka telah membuktikan secara sah dan sederhana bahwa termohon memiliki lebih dari 1 (satu) kreditor. Dengan demikian berdasarkan hal tersebut, permohonan yang diajukan terhadap termohon telah memenuhi syarat dapat diajukannya permohonan PKPU. Hal ini sesuai dengan Ketentuan Pasal 222 ayat (1) UU Kepailitan¹⁰, yang berbunyi : “*Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang diajukan oleh Debitor yang mempunyai lebih dari 1 (satu) Kreditor atau oleh Kreditor*”.

- d. Pemohon (*in casu kreditor*) memperkirakan bahwa termohon (*in casu debitor*) tidak mampu membayar utang-utang yang telah jatuh tempo.

Sebagaimana yang telah diuraikan bahwa termohon telah terbukti tidak melakukan pembayaran utang sewa yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih, pemohon telah meminta dan atau/ menagih termohon secara patut untuk membayar utangnya melalui surat teguran dan surat peringatan, faktanya termohon tidak memiliki iktikad baik dan tidak pernah melakukan kewajiban pembayaran atas utang sewa kepada pemohon. Dengan alasan tersebut pemohon dapat mengajukan Permohonan PKPU yang sesuai dengan ketentuan Pasal 222 ayat (3) UU Kepailitan¹¹ yang berbunyi :

“kreditor yang memperkirakan bahwa Debitor tidak dapat melanjutkan membayar utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih, dapat memohon agar kepada debitor diberi penundaan kewajiban pembayaran utang, untuk memungkinkan debitor mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utangnya kepada kreditor”.

¹⁰ Undang-Undang No.37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

¹¹ Undang-Undang No.37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

Dapat dibuktikan permohonan PKPU *a quo* secara sederhana, maka demi hukum, Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* harus mengabulkan permohonan PKPU berdasarkan ketentuan Pasal 225 ayat (3) UU Kepailitan yang berbunyi : *“Dalam hal permohonan diajukan oleh kreditor, Pengadilan dalam waktu paling lambat 20 (dua puluh) hari sejak tanggal di daftarkannya surat permohonan, harus mengabulkan permohonan penundaan kewajiban utang sementara dan harus menunjuk Hakim Pengawas dari hakim pengadilan serta mengangkat 1 (satu) atau lebih pengurus yang bersama dengan debitor mengurus harta debitor”*.

Dengan berdasarkan Pasal 225 ayat 4 UU No.37 Tahun 2004 PKPU Sementara ditetapkan kepada debitor adalah paling lama 45 hari, maka permohonan ini Majelis Hakim menetapkan PKPU (S) adalah selama 30hari setelah putusan ini diucapkan. Dengan PKPU (S) Majelis hakim telah menggunakan Asas kepastian hukum (*rechtmatigheid*) yakni kepastian undang-undang atau peraturan, segala macam cara, metode lain yang harus berdasarkan undang-undang atau peraturan.

Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) telah dikabulkan oleh Majelis Hakim dan menyatakan termohon berada dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, maka hakim pengawas dan pengawas akan ditetapkan untuk memeriksa perkara, dan menetapkan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Sementara terhadap termohon paling lama 45 (empat puluh lima) hari sejak dikeluarkannya putusan.

Termohon telah menanggapi permohonan PKPU dan telah mengajukan tanggapan/jawaban secara tertulis yaitu termohon sangat berkeinginan untuk memenuhi kewajiban pembayaran utangnya kepada para kreditor termasuk pemohon meskipun industri telekomunikasi CDMA saat ini sangat tidak kondusif. Sejak 2010 termohon mengalami penurunan pendapatan karena menurunnya pendapatan dari percakapan (voice) dan penggunaan SMS, dengan demikian termohon belum memiliki kemampuan untuk membayar utang-utangnya yang sudah jatuh tempo dan dapat ditagih kepada para kreditor. Termohon kedepan berencana beralih ke teknologi yang lebih maju antara lain melalui kerja sama dengan pihak lain oleh karena itu termohon memiliki keyakinan dan kemampuan untuk membayar utang-utangnya yang sudah jatuh waktu dan kesempatan merestrukturisasi utang-utangnya.

Termohon mengajukan rencana perdamaian dalam jawabannya atas permohonan ini, berdasarkan hal tersebut termohon memohon kepada Majelis dapat memberikan putusan menurut ketentuan perUndang-Undangan yang berlaku. Termohon bersama dengan jawabannya atas permohonan PKPU ini menyertakan dan melampirkan Ringkasan Rencana Perdamaian kepada seluruh kreditor. Sesuai dengan tata cara yang dimaksud dalam BAB III Undang-Undang No.37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Pasal 224 ayat (4)¹² UUK mengatur : *“pada sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Debitor mengajukan daftar yang memuat sifat, jumlah piutang, dan utang debitor beserta surat bukti secukupnya dan bila ada rencana perdamaian”*.

¹² Undang-Undang No.37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

Pasal 224 ayat(3) UU, mengatur : *“Dalam hal permohon adalah kreditor, Pengadilan wajib memanggil Debitor melalui juru sita dengan surat kilat tercatat paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum sidang”*.

Rencana perdamaian yang diajukan oleh termohon merupakan bentuk kesungguhan Termohon untuk menyelesaikan pembayaran utang, besar harapan terhadap Rencana Perdamain (terlampir) dapat di setujui oleh para kreditor termasuk disetujui oleh pemohon dan dikabulkan oleh Majelis Hakim, rencana perdamaian dapat diterima jika memenuhi syarat dalam Pasal 281 ayat (1) UUK dan di homologasi sebagaimana di dalam Pasal 285 ayat (1) UUK.

Undang-Undang No.37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dibentuk dengan tujuan untuk melindungi kepentingan kreditor dan debitor. Oleh karena itu, aspek keadilan untuk kepentingan kedua pihak sangat diperlukan dalam undang-undang. Keadilan menjadi landasan moral hukum dan sekaligus tolak ukur sistem hukum positif tanpa keadilan sebuah aturan tidak pantas menjadi hukum. Dalam hal ini hakim menggunakan aspek keadilan (filosofis) untuk melakukan pemeriksaan perkara atas pengajuan Rencana Perdamaian (Homologasi) oleh termohon, karena dengan pengajuan Homologasi termohon sudah mempunyai itikad baik untuk melunasi utang tanpa merugikan pihak manapun.

Pemeriksaan dan Penyelesaian utang melalui PKPU berdasarkan putusan pengesahan (Homologasi) No.59/Pdt-sus-PKPU/2014/PN.Niaga.Jkt.Pst diawali sejak PT. Bakrie Telecom Tbk mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada para kreditor. Rencana

perdamaian yang diajukan oleh termohon tersebut menjelaskan cara pembayaran utang dengan mengelompokkan utang menjadi beberapa kategori yaitu, *Tranche A*, *Tranche B*, *Tranche C* dan *Tranche D* serta pemotongan pokok pinjaman dan pengurangan tingkat suku bunga, perpanjangan jangka waktu pelunasan, konversi utang kepada saham dan pembebasan utang sebagai bentuk restrukturisasi utang. Selanjutnya, pada tanggal 5 Desember dilakukan rapat pencocokan piutang dan verifikasi pajak yang diajukan oleh 414 kreditor Kreditor dengan jumlah tagihan sebesar Rp. 18.688.299.138.075,16 (Delapan belas triliun enam ratus delapan puluh delapan miliar duaratus Sembilan puluh sembilan juta seratus tiga puluh delapan ribu tujuh puluh limaRupiah dan enam belas sen)¹³, namun yang diakui oleh pengurus PKPU 398 kreditor. hal sesuai dalam Pasal 271 Undang-undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang¹⁴ yang berbunyi :
“semua perhitungan yang telah dimasukkan oleh pengurus harus dicocokkan dengan catatan dan laporan dari debitor.

Setelah itu pada tanggal 8 Desember2014 dilakukan rapat pembahasan dan *voting* atas rencana perdamaian yang dihadiri oleh 345 kreditor. Berdasarkan hasil dari *voting* tersebut maka diperoleh 325 (tiga ratus dua puluh lima) kreditor konkuren. kreditor setuju atau sebesar 94,5% (sembilan puluh empat koma lima puluh enam persen) dari jumlah suara kreditor konkuren yang haknya diakui atau sementara diakui yang hadir dalam pemungutan suara dengan tagihan sebesar Rp.9.680.786.529,18 (sembilan triliun enam ratus delapan puluh miliar tujuh ratus

¹³ Putusan Pengesahan Perdamaian (Homologasi) No.59/Pdt.Sus-PKPU/2014/PN.Niaga.Jkt, Hlm.6

¹⁴ Undang-Undang No.37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

dua puluh enam juta sembilan puluh tujuh ribu lima ratus dua puluh sembilan rupiah dan delapan belas sen). 11 kreditor tidak setuju atau sebesar 3,95% (tiga koma sembilan puluh lima persen) dari jumlah suara kreditor konkuren yang haknya diakui atau sementara diakui yang hadir dalam pemungutan suara. 7 kreditor absainatau sebesar 1.49% (satu koma empat puluh sembilan (persen) dari jumlah suara kreditor konkuren yang haknya diakui atau sementara diakui yang hadir dalam pemungutan suara¹⁵.

Dari komposisi perhitungan suara tersebut telah disetujui oleh 2 (dua) para kreditor separatis, yang mewakili 100% (seratus persen) jumlah suara kreditor separatis yang haknya diakui atau sementara diakui yang hadir dalam pemungutan suara. Sesuai dengan ketentuan Pasal 281 Ayat (1) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang rencana perdamaian dapat diterima berdasarkan :

- a. Persetujuan lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu perdua) jumlah kreditor konkuren yang haknya diakui atau sementara diakui yang hadir pada rapat kreditor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 268 termasuk kreditor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280, yang bersama-sama mewakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) bagian dari seluruh tagihan yang diakui atau sementara diakui dari Kreditor Konkuren atau kuasanya yang hadir dalam rapat tersebut; dan
- b. Persetujuan lebih dari $\frac{1}{2}$ (datu perdua) jumlah Kreditor yang piutangnya dijamin digadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek, atau hak anggunan, atas kebendaan lainnya yang ahdir dan mewakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) bagian dari dari seluruh tagihan dari Kreditor tersebut atau kuasanya yang hadir dalam rapat tersebut.

Berdasarkan Pasal 281 ayat (1) Undang-undang No.37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang maka Majelis

¹⁵ Putusan Pengesahan Perdamaian (Homologasi) No.59/Pdt.Sus-PKPU/2014/PN.Niaga.Jkt, Hlm.3

Hakim berpendapat kuorum dalam pengambilan suara untuk persetujuan rencana perdamaian telah terpenuhi dan mengikat para pihak sah menurut hukum. Setelah mendengar dan mempelajari laporan Hakim Pengawas, Tim Pengurus, Debitor Dan dan Kreditor tidak ada alasan guna menolak untuk mengesahkan perdamaian sebagaimana di syartkan dalam Pasal 285 Ayat (2) Undang-Undang No. 47 Tahun 2004 tentang Kepalitana Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang menyebutkan :

- (2) Pengadilan wajib menolak untuk mengesahkan perdamaian apabila:
- a. harta debitor, termasuk benda untuk mana dilaksanakan hak untuk menahan benda, jauh lebih besar daripada jumlah yang disetujui dalam perdamaian;
 - b. pelaksanaan perdamaian tidak cukup menjamin;
 - c. perdamaian itu dicapai karena penipuan, atau persekongkolan dengan satu atau lebih kreditor, atau karena pemakaian upaya lain yang tidak jujur dan tanpa menghiraukan apakah debitor atau pihak lain bekerja sama untuk mencapai hal ini; dan/atau
 - d. imbalan jasa dan biaya yang dikeluarkan oleh ahli dan pengurus belum dibayar atau tidak diberikan jaminan untuk pembayarannya.

Dalam Perjanjian Perdamaian ini Debitor dan Kreditor saling menyetujui hal-hal yang diatur didalam Rencana Perdamaian ,sebagai berikut :

1. Rencana perdamaian dibuat dengan mempertimbangkan dan mendasarkan kepada keadaan kegiatan usaha Perseroan saat ini, keadaan pasar, serta kedudukan para kreditor perseroan sehubungan dengan jaminan-jaminan yang dimiliki oleh kreditor separatis dan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang relevan dengan jaminan-jaminan yang diberikan tersebut;
2. *Cash Waterfall*. Perseroan akan berusaha mengalokasikan Sisa Kas Operasional (diluar utang baru dan penerbitan saham baru) dari kegiatan

usaha utama Perseroan kedalam suatu rekening Perseroan dan akan dipergunakan dengan urutan skala prioritas berikut :

- a. Segala perpajakan termasuk utang pajak yang berhubungan dengan kegiatan operasional Perseroan sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku;
- b. Seluruh biaya dan ongkos sehubungan dengan proses PKPU Perseroan, termasuk namun tidak terbatas pada honorarium pengurus, biaya dan ongkos perkara, biaya para penasehat hukum dan keuangan Perseroan, biaya dan ongkos yang timbul dari proses implementasi Rencana Perdamain yang dihomologasi, baik berupa biaya notaris ataupun biaya lainnya sebagaimana dipandang perlu atau wajib oleh perseroan.
- c. Cadangan biaya operasional maksimum 1 bulan kedepan, cadangan biaya modal maksimum 6 bulan kedepan , dan biaya pembongkaran atas alat peralatan telekomunikasi milik perseroan, dari fasilitas infrastruktur telekomunikasi, termasuk tower/menara telekomunikasi yang disewa oleh Perseroan dari Kreditor utang Tower Provider, dan biaya operasional lainnya;
- d. Pembayaran kewajiban Utang baru sehubungan dengan modal kerja dan utang belanja modal;
- e. Untuk memenuhi Cadangan Dana Tunai maksimum Rp.100.000.000.000 (seratus miliar Rupiah)
- f. Pembayaran utang BHP dan USO yang sudah jatuh tempo dan Cadangan Pembayaran cicilan Utang BHP satu tahun berjalan;

- g. Pembayaran utang yang sudah jatuh tempo atas utang kategori *Trance A* dan cadangan pembayaran cicilan utang kategori *Trance A* untuk satu tahun berjalan; pembayaran bunga dan cicilan pokok yang sudah jatuh tempo secara prorata atas utang kategori *Trance B*; Pembayaran bunga dan cicilan pokok yang suda jatuh tempo secara prorata atas uang ketgori *Trance C*; dan pembayaran bunga dan cicilan pokok secara prorata utang kategori atas *Trance D*, pembayaran bunga bunga dan cicilan pokok secara prorata atas jumlah bunga dan pembayaran cicilan pokok yang harus dibayar pada tahun berjalan atas utang kategori *Trance B*, *Trance C*, *Trance D*;
- h. *Cash Sweep*. Bila masih terdapat kelebihan dana setelah pemenuhan prioritas *Cash Waterfall* tersebut akan digunakan sebagai pembayaran lebih awal atas utang yang diatur dalam Rencana Perdamaian ini yang akan jatuh tempo terdekat berikutnya dengan tetap mengikuti urutan prioritas *Cash Waterfall* diatas mulai dari butir f sampai g. Perhitungan *Cash Waterfall* dilakukan setiap bulan ke-4 setelah laporan keuangan semesteran akhir Juni dan laporan keuangan tahunan Desember setiap tahunnya, dan pertama kali akan dilakukan terhadap laporan keuangan Perseroan bulan Juni 2015, sedangkan pembayaran atas utang berdasarkan Rencana Perdamain ini dilakukan mulai bulan Juni setiap tahunnya setelah penghitungan *Cash Waterfall*, dan pembayaran pertama kali atas utang berdasarkan Rencana Perdamaian ini dilakukan paling lambat bulan ke-18 setelah Tanggal Homologasi. Perseroan akan menunjuk akuntan

monitoring yang independen yang akan mengawasi pelaksanaan *Cash Waterfall* sesuai dengan urutan prioritas ini.

3. Pengesampingan terhadap kewajiban lain. Rencana Perdamaian ini tidak mengikat atau tidak berlaku terhadap pembayaran atau pelaksanaan kewajiban-kewajiban Perseroan kepada setiap pihak yang terkait dengan pelaksanaan perjanjian penggabungan kegiatan usaha penyelenggaraan jaringan telekomunikasi antara Perseroan dengan PT Smartfren Telecom Tbk tanggal 30 Oktober 2014 berikut seluruh perjanjian turutaannya (bila ada)¹⁶.
4. Pemindahan Hak. Kreditor dapat memindahkan hak atas tagihan mereka kepada pihak lain berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dengan tetap tunduk pada ketentuan.
5. Ketentuan-ketentuan Umum Restrukturisasi¹⁷:
 - a. Rencana perdamaian dan langkah-langkah restrukturisasi yang telah di homologasi berlaku dan mengikat masing-masing utang verifikasi, utang tidak terverifikasi, kreditor atas utang diluar verifikasi,
 - b. Seluruh bunga, penalti, dan/atau benda denda yang telah timbul sampai tanggal homologasi akibat Utang Perseroan akan dihapuskan seluruhnya, kecuali diatur sebaliknya secara tegas dan khusus oleh Perseroan dalam Rencana Perdamaian.

¹⁶ Putusan Pengesahan Perdamaian (Homologasi) No.59/Pdt.Sus-PKPU/2014/PN.Niaga.Jkt, Hlm.14

¹⁷ Putusan Pengesahan Perdamaian (Homologasi) No.59/Pdt.Sus-PKPU/2014/PN.Niaga.Jkt, Hlm.14

- c. Apabila Perseroan memberikan bunga atas pembayaran utang yang diatur dalam Rencana Perdamaian ini maka sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku Perseroan berhak memotong segala pajak yang timbul.
- d. Terhitung sejak tanggal homologasi, seluruh hak kepemilikan atas benda atau barang atau suatu bentuk lain yang bisa dinyatakan sebagai benda atau barang yang belum diserahkan oleh kreditor kepada perseroan yang terkait dengan utang yang diatur dalam Rencana Perdamaian .
- e. Tagihan-tagihan lain yang belum teridentifikasi sampai Perdamaian ini dihomologasi; dan yang baru teridentifikasi setelah perjanjian perdamaian di homologasi namun tagihan tersebut berasal dari atau timbul karena kondisi, perbuatan hukum, permulaan atau rangkaian kejadian, atau ketentuan hukum yang terdapat sebelum perjanjian perdamaian ini dihomologasi.
- f. Pengelompokan utang terbagi menjadi *Tranche A, Tranche B, Tranche C, Tranche D* dalam Rencana perdamaian ini dimaksudkan untuk keperluan Pengaturan *Cash Waterfall*.

6. Ketentuan-ketentuan khusus Restrukturisasi ¹⁸:

Restrukturisasi atas tiap utang perseroan terbagi atas :

- 1. Utang usaha
- 2. Utang *tower provider* (penyedia menara)
- 3. Utang biaya hak pengguna (BHP) dan *universal service obligation* (USO),
- 4. Utang dana hasil wesel senior

¹⁸ Putusan Pengesahan Perdamaian (Homologasi) No.59/Pdt.Sus-PKPU/2014/PN.Niaga.Jkt, Hlm.15

5. Utang Afiliasi,
6. Utang dengan jaminan (utang kategori Trance B),
7. Utang akibat derivatif (utang kategori *Tranche C*),
8. Utang pembiayaan kendaraan,

Berikut adalah salah satu ketentuan restrukturisasi utang yakni restrukturisasi khusus utang usaha :

TABEL 3.3

KETENTUAN RESTRUKTURISASI KHUSUS UTANG USAHA

No	Kategorisasi	Besarnya Utang Usaha (Rp)	Sistematika pembayaran (setelah homologasi)
1.	Pertama	1 - 100.000.000	50% dibayar selambatnya Bulan ke 18; 50% bulan ke-30
		100.000.000 – 500.000.00	20% dibayar selambatnya bulan ke 24; 35% bulan ke 36; 45% bulan 48
		500.000.000 – 1.000.000.000	10% dibayar selambatnya bulan ke 24; 15% pada bulan ke 36; 20% bulan ke 48, 55% bulan ke 60
		1.000.000.000 – 2.000.000.000	5% dibayar selambatnya bulan ke 24; 10% pada bulan ke 36 ; 15% bulan ke-48; 25% bulan ke-60; 45% bulan ke-72.
		2.000.000.000 – 3.000.000.000	5% dibayar selambatnya bualan ke-24; 5% bulan ke-36; 10% bulan ke-48; 10% bulan ke-60; 25% bulan ke-72; 45% bulan ke-84
2.	Kedua	>3.000.000.000	30% dari sisa utang usaha setelah dikurangi akan dibayarkan secara tunai yakni : 7,5% dibayar tunai pada bulan ke 18, 17,5% dibayar pada bulan ke 30, 17,5% dibayar pada bulan ke 42, 17,5% dibayar pada bulan ke 54, 40% dibayar pada bulan ke 66.

Sumber : Putusan Pengesahan Perdamaian (Homologasi) No.59/Pdt.Sus-PKPU/2014/PN.Niaga.Jkt

Keterangan :

Pertama : utang usaha Rp1-Rp3.000.000.000 (utang kategori *Tranche A*),

Kedua : utang usaha diatas Rp.3.000.000.000(utang kategori *Tranche C dan D*)

Pengimplementasian perjanjian perdamaian dan langkah-langkah selanjutnya diantaranya sebagai berikut : Setelah pemungutan suara (*voting*) dalam rapat kreditor atas Rencana Perdamaian dilakukan dan disetujui oleh mayoritas para kreditor sesuai dengan ketentuan dimaksud dalam Pasal 281 ayat (1) UUK, Majelis Hakim dalam Perkara 59/Pdt.Sus/PKPU/2014/PN.Niaga.Jkt.Pst sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 281 ayat (1) UUK mensahkan (homologasi) Perjanjian Perdamaian pada tanggal 9 Desember atau tanggal lain yang ditetapkan kemudian; untuk menghindari keragu-raguan, para pemegang saham pengendali yang pada saat Perjanjian Perdamain ini dihomologasi mengendalikan perseroan; apabila rencana perdamaian telah di setujui oleh mayoritas kreditor dalam pemungutan suara pada Rapat Kreditor maka rencana perdamaian berlaku efektif sebagai perjanjian perdamaian yang mengikat perseroan dan seleruh kreditor tanpa terkecuali, sesuai dengan ketentuan dimaksud dalam Pasal 286 UUK¹⁹.

Dengan di periksa dan diprosesnya perkara No.59/Pdt.Sus/PKPU/2014/PN.Niaga.Jkt.Pst membuktikan bahwa hakim telah menyelesaikan pemeriksaan dan diprosesnya perkara dengan memperhatikan aspek keadilan dan mengimplementasikan Undang-Udang No.37 Tahun 2004 dalam perkara tersebut.

¹⁹ Putusan Pengesahan Perdamaian (Homologasi) No.59/Pdt.Sus-PKPU/2014/PN.Niaga.Jkt, Hlm.34

Undang-Undang RI Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang memberikan kesempatan bagi debitor yang ingin melunasi utangnya dengan jalan PKPU akan diputus dengan putusan Homologasi dikarenakan debitor masih mempunyai peluang bisnis pada masa yang akan datang dan mempunyai itikad baik untuk melunasi utangnya. Penjatuhan putusan Homologasi dapat diketahui oleh masyarakat umum sebagai pencerminan aspek kemanfaatan (sosiologis). Aspek sosiologis adalah aspek yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek

Sesuai dengan ketentuan Pasal 285 ayat (1) UUK dan PKPU , maka perjanjian perdamaian yang telah disepakati dan ditanda tangani oleh perseroan dan para kreditor setelah mendapat pengesahan dari Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, merupakan hak perseroan dan para kreditor untuk dijalankan sebagaimana dimaksud pada ketentuan Pasal 287 , sekaligus mengakhiri PKPU terhadap Perseroan dalam register perkara No.59/Pdt.Sus/PKPU/2014/PN.Niaga.Jkt.Pst yang akan di umumkan pada tanggal 9 Desember 2014 atau tanggal lain yang ditetapkan yang sesuai pada ketentuan Pasal 288. Rencana perdamaian yang telah disetujui dalam rapat kreditor pada tanggal yang sama dengan tanggal perjanjian Perdamaian ini yaitu pada tanggal 8 Desember 2014 dan setelah disahkan oleh pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam register perkara

No.59/Pdt.Sus/PKPU/2014/PN.Niaga.Jkt.Pst, maka sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 286 UUK dan PKPU mengikat semua kreditor²⁰.

Dengan ini akibat hukum dalam Putusan ini adalah mengesahkan perjanjian perdamaian antara debitor dan para kreditornya dikarenakan telah memenuhi syarat-syarat Pasal 281 ayat (1) dan Pasal 285 ayat (2) UUK PKPU. Selanjutnya, menyatakan Putusan Homologasi No.59/Pdt.Sus/PKPU/2014/PN.Niaga.Jkt.Pst demi hukum berakhir (berakhir dengan disahkan) yang mengakibatkan hubungan termohon dengan para kreditornya tidak lagi ditentukan dengan ketentuan-ketentuan dalam perjanjian sebelum termohon dimohonkan PKPU melainkan putusan homologasi tersebut akan menciptakan hubungan hukum baru antara debitor dan para kreditornya sebagaimana yang diperjanjikan dalam perjanjian perdamaian. Akibat hukum lainnya yaitu menghukum termohon dengan membebankan biaya perkara sebesar Rp. 1.327.000,00 (satu juta tiga ratus dua puluh tujuh ribu rupiah) kepada termohon²¹.

Dengan adanya putusan homologasi yang berkaitan dengan para kreditor dan melibatkan banyak pihak diantaranya debitor, para pekerja yang bekerja pada debitor, para pemegang saham dan pihak lain yang terlibat, maka disahkannya putusan homologasi yang diketahui oleh masyarakat umum telah mencerminkan adanya aspek kemanfaatan dalam putusan No.59/Pdt.Sus/PKPU/2014/PN.Niaga.Jkt.Pst, dikarenakan dengan adanya putusan

²⁰ Putusan Pengesahan Perdamaian (Homologasi) No.59/Pdt.Sus-PKPU/2014/PN.Niaga.Jkt, Hlm.75

²¹ Putusan Pengesahan Perdamaian (Homologasi) No.59/Pdt.Sus-PKPU/2014/PN.Niaga.Jkt, Hlm.76

homologasi tersebut perkara yang di daftarkan dipengadilan bisa diselesaikan dengan jalan perdamaian dan tidak merugikan banyak pihak.

B. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Putusan (No.59/Pdt.Sus-PKPU/2014/PN.Niaga.Jkt.Pst)

Utang piutang (*al-qord*) dalam Islam dapat digunakan untuk kebutuhan konsumtif (pribadi). Akan tetapi, pengusaha (*mudharib/debitor*) berutang atau meminjam dana atau modal kepada pemilik modal (*shabibul mal/kreditor*) untuk menjalankan usahanya yang membutuhkan modal dan hanya memiliki kemampuan atau keterampilan untuk tujuan produktif (usaha yang mendapat keuntungan). Sebagai makhluk sosial, kebutuhan kerjasama antara satu pihak dengan pihak lain guna meningkatkan taraf perekonomian dan kebutuhan hidup, atau keperluan-keperluan lain, tidak bisa diabaikan. Maka dalam melakukan kerjasama dalam hukum Islam terdapat salah satu akad *syirkah* yaitu *syirkah mudharabah* atau disebut dengan *mudharabah*.

Mudharabah adalah akad kerjasama antara pemilik modal (*shabibul mal*) dengan pengelola (*mudharib*), dimana *shabibul mal* memberikan modal untuk usaha produktif kepada *mudharib*, apabila mendapatkan keuntungan dibagi sesuai kesepakatan, sedangkan kerugian ditanggung *shabibul mal* selama bukan disebabkan karena unsur kelalaian dan kecurangan *mudharib*.

Dalam menjalankan usaha, tidak setiap orang atau pengusaha (*mudharib/debitor*) memiliki modal yang mencukupi. Begitu juga sebaliknya, seorang yang memiliki dana (*shabibul mal/kreditor*) belum tentu memiliki keahlian/ keterampilan dalam menjalankan usaha-usaha produktif. Dengan

demikian, *shabibul mal* dan *mudharib* kerja sama dengan sama-sama memberikan kontribusi dana/modal sehingga dapat menjalankan usaha produktif

Sama halnya dengan PT. Netwave Multi Media (*shabibul mal*/kreditor) yang melakukan kerja sama perjanjian sewa infrastruktur telekomunikasi dengan PT. Bakrie Telcom Tbk. (*mudharib*/debitor). Berdasarkan perjanjian sewa infrastruktur komunikasi tersebut, timbul kewajiban pembayaran oleh *mudharib*/debitor selaku penyewa infrastruktur telekomunikasi kepada *shabibul mal*/kreditor.

Dalam *Kompilasi Hukum Syariah* pada Pasal 207 ayat (3) menyatakan bahwa “*mudharib* mengembalikan modal dan keuntungan kepada pemilik modal yang menjadi hak pemilik modal dalam kerja sama *mudharabah*”. Dengan demikian, *mudharib* harus mengembalikan utang atau pinjaman sebagai modal usaha produktif sesuai dengan perjanjian ataupun yang sudah jatuh waktu pelunasan utang atau pengembalian modal. Dalam perjanjian sewa yang dilakukan oleh PT. Netwave Multi Media (*shabibul mal*/kreditor) dan PT. Bakrie Telcom Tbk. (*mudharib*/debitor) pihak *mudharib*/debitor melakukan wanprestasi yaitu tidak melunasi pembayaran sewa yang sudah jatuh waktu. Berdasarkan keadaan tersebut, *shabibul mal*/kreditor menilai bahwa *mudharib*/debitor tidak dapat melanjutkan pembayaran sewa dan membayar utang-utangnya, untuk itu *shabibul mal*/kreditor mengajukan permohonan PKPU dalam putusan No.59/Pdt.Sus-PKPU/2014/PN.Niaga.Jkt.Pst.

Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dalam Undang-Undang No.37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran

Utang (PKPU) Pasal 222 ayat (3), yang diajukan oleh kreditor dengan alasan debitor tidak dapat melanjutkan pembayaran utang yang sudah jatuh tempo dan dapat ditagih²². Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) tersebut beserta rencana perdamaian. sebagai cara dan waktu pelunasan utang debitor kepada kreditor.

Debitor yang tidak dapat melanjutkan membayar utang-utangnya dalam Pasal 222 ayat (2) UU No. 37 Tahun 2004²³, yang disebabkan perusahaan debitor pada saat itu menderita kerugian atau kebakaran yang menimpa pabrik, maupun kesulitan keuangan, mengakibatkan debitor berada dalam keadaan sulit untuk membayar utangnya, sehingga debitor maupun kreditor mengajukan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Ke Pengadilan Niaga dengan adanya itikad baik debitor untuk melunasi utang –utangnya kepada kreditor .

Itikad baik yang dilakukan oleh *shabibil mal*/kreditor yakni dengan mengajukan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) , dengan hal tersebut dimaksudkan juga untuk *mudharib*/debitor mengajukan rencana perdamaian (*accord*) yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada kreditor hal tersebut bisa dilakukan dengan cara memperpanjang waktu pelunasan utang, debitor berupaya dapat melunasi utangnya agar perusahaan yang dijalankan tidak pailit dan merugikan banyak pihak. Dalam putusan No.59/Pdt.Sus-PKPU/2014/PN.Niaga.Jkt.Pst permohonan PKPU yang diajukan *shabibil mal*/kreditor diterima oleh hakim dengan banyak bukti yang diajukan dan *mudharib*/debitor telah mengajukan rencana perdamaian

²² UU No.37 Tahun 204 tentang Kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang

²³ UU No.37 Tahun 204 tentang Kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang

(homologasi) terhadap *shabibul mal*/kreditor karena dengan diajukannya rencana perdamaian merupakan bentuk kesungguhan dan niat *mudharib*/debitor untuk menyelesaikan pembayaran utang agar tidak merugikan banyak pihak. Oleh sebab itu *mudharib*/debitor yang berutang harus disertai niat dalam hati untuk melunasinya dan menyelesaikan permasalahan dengan perdamaian, Rosulullah SAW bersabda²⁴ :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ خَذَ
أَمْوَالَ النَّاسِ يُرِيدُ أَدَاءَهَا أَدَّى اللَّهُ عَنْهُ ، وَمَنْ أَخَذَ يُرِيدُ إِتْلَافَهَا أَتْلَفَهُ اللَّهُ

Dalam Islam, niat merupakan syarat bagi semua amalan dalam ibadah, dengan niat akan diketahui baik buruknya amalan. Di dalam *ushul fiqih* terdapat kaidah²⁵ :

الأمور بمقاصدها

Dalam Islam, apabila memiliki utang kepada orang lain dan mampu membayarnya, maka segeralah membayar utang tersebut. Apabila pengelola (*mudharib*/debitor) yang berutang atau meminjam tidak mampu atau dalam kesulitan membayar utangnya atau mengembalikan modal kepada pemilik modal (*shabibulmal*/kreditor) yang digunakan untuk usaha produktif, maka berilah kesempatan atau pengunduran waktu pelunasan utang kepada *mudharib*/debitor sampai ia mampu membayarnya.

²⁴ Artinya : “Barang siapa yang mengambil harta orang (berhutang) dengan tujuan untuk membayarnya (mengembalikannya), maka Allah SWT akan tunaikan untuknya, dan barang siapa mengambilnya untuk menghabiskannya, maka Allah SWT akan membinaskannya”.

²⁵ Imam Masbukin, *Qawa'id Al-Fiqhiyah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001), Hlm.39 . Artinya: “segala urusan tergantung pada tujuannya”.

Dengan mengajukan permohonan PKPU *shabibulmal*/kreditor memberikan kesempatan kepada *mudharib*/debitor untuk menyelesaikan pembayaran utangnya dengan tujuan tidak merugikan banyak pihak. Diterimanya rencana perdamaian (homologasi) dalam putusan No.59/Pdt.Sus-PKPU/2014/PN.Niaga.Jkt.Pst *shabibulmal*/kreditor memberikan kesempatan pada *mudharib*/debitor untuk melunasi hutangnya dengan menambah jangka waktu pelunasan utang agar *mudharib*/debitor bisa meneruskan usahanya dan tidak terjadi kepailitan. Rencana perdamaian (homologasi) adalah cara yang terbaik dalam menyelesaikan perkara utang piutang di perusahaan, agar tidak merugikan kedua belah pihak.

Berdasarkan uraian tersebut, bahwa permohonan Penundaan Kewajiban Utang (PKPU) yang dilakukan oleh kreditor dikarenakan debitor tidak dapat melanjutkan membayar utang-utangnya atau mengembalikan modal/dana kepada kreditor sehingga debitor mengajukan rencana perdamaian (homologasi) untuk mendapatkan penambahan jangka waktu pembayaran agar bisa melunasi hutangnya tidak bertentangan dengan hukum Islam. Sesuai firman Allah SWT, Q.S Al-Baqarah ayat 280²⁶ :

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۚ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ ۖ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٢٨٠﴾

Menurut al-Qarni ayat diatas menjelaskan bahwa jika seseorang yang berhutang sedang berada dalam kesulitan, maka berilah tempo kepadanya sampai Allah STW memberikan kemudahan untuk mengugurkan sebagian utang darinya,

²⁶ Artinya : “dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, Maka berilah tangguh sampai Dia berkelapangan. dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui”.

maka itu lebih baik. Berarti kita yakin bahwa Allah SWT akan membalas orang yang berbuat baik dengan kebaikan-Nya dan akan memberinya keringanan sebagaimana memberi keringanan kepada orang yang sedang mengalami kesulitan²⁷. Ka'ab bin Umar berkata: Aku pernah mendengar Rosulullah bersabda²⁸ :

مَنْ أَنْظَرَ مُعْسِرًا أَوْ وَضَعَ عَنْهُ أَظْلَهُ اللَّهُ فِي ظِلِّهِ

Maksud hadits diatas, apabila orang yang memberikan piutang (*shabibul mal/kreditor*) memberikan penagguhan tagihan kepada *mudharib/debitor* yang dalam kesulitan membayar utangnya. Apabila membebaskannya, maka Allah akan memayungi-Nya dibawah naungan-Nya²⁹.

Dala kasus kreditor mengajukan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dan memperkirakan tidak akan dapat melanjutkan membayar utang-utangnya dalam putusan No.59/Pdt.Sus-PKPU/2014/PN.Niaga.Jkt.Pst., maka debitor boleh mengajukan Rencana Perdamaian untuk menyelesaikan perkara. Maksud memperkirakan diatas, debitor tidak yakin bisa membayar utang-utangnya yang sudah jatuh tempo, kreditor berkeyakinan debitor masih ada kemungkinan dapat membayar utang-utang yang jatuh tempo. Maka hal ini tidak boleh dalam Islam, karena merupakan perbuatan dzalim menunda pembayaran

²⁷ ‘Aidh Al-Qarni, *Tafsir Muyassar*, 6 Jilid Diterjemahkan Oleh Tim Qisthi Press (Jakarta :, Qisthi Press, Jilid 1, 2007), Hlm.222

²⁸ Artinya : “Barang siapa memberi tenggang waktu bagi orang yang berada dalam kesulitan untuk melunasi hutang atau bahkan membebaskan utangnya, maka dia akan mendapat naungan Allah. ” (HR. Muslim no. 3006).

²⁹ Sayid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, 4 Jilid, Diterjemahkan Oleh Nor Hasanuddin (Jakarta: Pena Pundi Aksara, Jilid 4 ,2008) Hlm.186

utang apabila debitor dapat membayar utang-utangnya. Sebagaimana di riwayatkan dari Abu Hurairah, bahwa Rosulullah bersabda³⁰:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ مَطْلُ
الْغَنِيِّ ظُلْمٌ ، فَإِذَا أُتْبِعَ أَحَدُكُمْ عَلَى مَلِيٍّ فَلْيَتَّبِعْ

Dalam ilmu Ushul Fiqh, permasalahan Penundaan Kewajiban Penundaan Pembayaran Utang (PKPU) dalam ruang lingkup *istishab*. *Istishab* menurut Ibn Hazm adalah “berlakunya hukum asal yang ditetapkan berdasarkan *nash* (ayat atau hadits) hingga dalil yang lain menunjukkan perubahan hukum tersebut”³¹. Bahwa dalam Al-Qur’an maupun hadits dianjurkan memberikan penagguhan kepada orang yang berutang apabila dalam kesulitan dan tidak mampu membayar utangnya, dan tidak ada dalil lain yang mengharamkannya. Kaidah fiqh yang dipakai dalam permasalahan ini³² :

الأصلُ في الأشياءِ إلا بآ حجة حتى يدلَّ الدليلُ على التحريم

Bahwa segala sesuatu yang belum ditunjukkan oleh dalil yang tegas tentang halal dan haramnya, hendaklah kepada ketentuan aslinya yaitu mubah. Kaidah fiqiyah diatas adalah kaidah yang dipegang oleh mazhab Syafi’i³³. Sehingga Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dalam Undang-Undang No.37 Tahun 2004 (BAB III dari Pasal 222 sampai Pasal 294) dalam putusan No.59/Pdt.Sus-PKPU/2014/PN.Niaga.Jkt.Pst. itu diperbolehkan, karena tidak ada

³⁰ “Abu Hurairah radhiyallahu ‘anhu meriwayatkan bahwa Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Penundaan (pembayaran hutang dari) seorang yang kaya adalah sebuah kelaliman, maka jika salah seorang dari kalian di pindahkan kepada seorang yang kaya maka ikutilah.” (HR. Bukhari)

³¹ Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh*, (Jakarta : Logos Wacana Ilmu , 2001) Hlm. 128

³² Artinya : "Hukum asal dari sesuatu adalah mubah sampai ada dalil yang melarangnya (memakruhkannya atau mengharamkannya)"

³³ Imam Masbukin, *Qawa'id Al-Fiqhiyah*, Hlm.59

dalil Al-Qur'an maupun Hadits yang melarang Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) tersebut.

Dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang dilakukan orang atau Badan Hukum Syari'ah (*Syakhshiyah Hukumiyah*), menurut fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor: 19/DSN-MUI/IX/2000 bahwa jika debitor tidak dapat membayar sebagian atau seluruh kewajibannya pada jatuh tempo, sedangkan kreditor telah memastikan ketidakmampuannya, maka debitor dapat melakukan :

- a. Memperpanjang jangka waktu pembayaran
- b. Menghapus (*write off*) sebagian atau seluruh utangnya atau bank dapat mendaftarkan debitor ke Pengadilan Agama³⁴.

Pada penjelasan Pasal 49 huruf (i) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang, memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara antara orang-orang beragama Islam di bidang ekonomi syari'ah, antara lain meliputi : bank syari'ah, asuransi syari'ah, resuransi syari'ah, reksadana syari'ah, lembaga keuangan mikro syari'ah, obligasi syari'ah, sekuritas syari'ah, dan dana pensiun lembaga keuangan syari'ah. Dengan menghubungkan pada Pasal Undang-Undang No.37 Tahun 2004, maka pihak yang dapat mengajukan perkara Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) bidang Ekonomi Syari'ah:

1. Kreditor dan debitor, baik perseorangan atau badan hukum (*syakhshiyah hukmiyyah*) yang melakukan bisnis syariah

³⁴ fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor: 19/DSN-MUI/IX/2000

2. Bank Indonesia dalam hal debitor adalah Bank Syari'ah atau Lembaga keuangan syariah
3. Badan pengawas pasar modal dalam hal debitor adalah reksadana syariah, obligasi syariah, surat berharga syariah, dan sekuritas syariah
4. Menteri keuangan dalam hal debitor adalah asuransi syariah, reasuransi syariah, pegadaian syariah, dana pensiun lembaga keuangan syariah.

Dengan demikian, permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dalam Undang-Undang No.37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dari Pasal 222 sampai Pasal 294 tidak bertentangan dengan hukum Islam. Rencana perdamaian yang diajukan oleh debitor dalam putusan No.59/Pdt.Sus-PKPU/2014/PN.Niaga.Jkt.Pst. yang terdapat Pasal 222 ayat (2) sesuai dengan ajaran Islam. Dalam Islam, perdamaian disebut *shulhu*. Menurut bahasa, *shulhu* ialah memutuskan perselisihan. Adapun menurut istilah ialah akad yang memutuskan perselisihan antara dua orang yang berselisih.

Debitor mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada kreditornya dalam Pasal 222 ayat (2) UU No. 37 Tahun 2004. Hal ini termasuk *shulhu ibra'*. *Shulhuh ibra* (membebaskan) yaitu meng-*qasar*-kan (meringkas) utang, mengurangi hak dengan pembayaran sebagian. Hal tersebut merupakan rencana perdamaian yang diajukan debitor dalam pelunasan utangnya kepada kreditor sebagian dibolehkan dalam Islam dengan syarat adanya kesepakatan kedua belah pihak.